

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

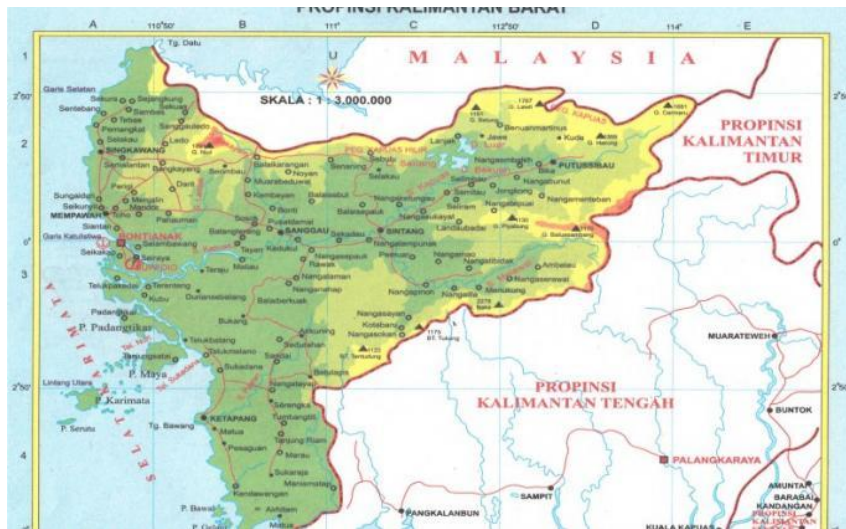
Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar merupakan salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembapan yang tinggi. Provinsi Kalimantan Barat merupakan daratan yang berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Kalimantan Barat termasuk Provinsi terluas keempat setelah Irian Jaya (421.891 km²), Kalimantan Timur (220.440 km²), dan Kalimantan Tengah (152.600 km²)¹.

Wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-

¹Pemprov Kalimantan Barat. (2019). *Gambaran Umum, Aspek Geografis*, <http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2>. Diakses pada 5 Februari 2019

satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak-Entikong-Kuching (Serawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar 6-8 jam perjalanan. Di bagian Utara, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Di bagian Selatan, Kalbar berbatasan langsung dengan laut Jawa dan Kalimantan Tengah, di bagian Timur, Kalbar berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, dan di bagian Barat, Kalbar berbatasan langsung dengan laut Natuna dan Selat Karimata. Di sebelah utara Kalbar, terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negari Jiran Malaysia, yaitu Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang membujur sepanjang pegunungan Kalingkang Kapuas Hulu².

²Pemprov Kalimantan Barat. (2019). *Gambaran Umum, Aspek Geografis*, <http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2>. Diakses pada 5 Februari 2019



Gambar 1.1: Peta Wilayah Kalimantan Barat

(Sumber: Tribun Pontianak.com)

Total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sekitar 4.395.983 jiwa, dimana sekitar 2.246.903 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.149.080 jiwa berjenis kelamin perempuan. Angka ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan, dari segi ekonomi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki permasalahan dalam hal infrastruktur yang kurang baik dan minimnya investasi dalam negeri dan juga asing³. Rendahnya sumber daya manusia yang berpengalaman, serta belum efektifnya kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Investasi asing yang masih berfokus di kota-kota besar seperti pulau Jawa, Sumatera, dan

³Pontianakpost.co.id. (2018). *Daya Saing Kalbar Terpuruk*. <https://www.pontianakpost.co.id/daya-saing-kalbar-terpuruk>. Diakses pada 8 Februari 2019

Sulawesi membuat Provinsi Kalimantan Barat tertinggal dan jauh dari perhatian pemerintah⁴.

Dalam hal perekonomian dan kesejahteraan di Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan tiga provinsi lainnya, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang lambat dalam hal infrastruktur, investasi, dan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura⁵.

Kebutuhan akan investasi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di provinsi Kalimantan Barat sangat diperlukan, Namun, dalam menarik investor untuk masuk merupakan hal yang sulit. Pemerintah bersama semua elemen masyarakat harus melakukan evaluasi. Hal dasar yang harus diperhatikan adalah infrastruktur, prosedur, serta perikinan yang seharusnya memudahkan para investor. Penyelerasan, dan kesepadan dalam tatanan pusat, atau antara

⁴BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2018). *Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin*. <https://kalbar.bps.go.id/statictable/2018/02/26/125/jumlah-penduduk-provinsi-kalimantan-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-sensus-penduduk-2010.html>. Diakses pada 8 Februari 2019

⁵Pontianakpost.co.id. (2018). *Daya Saing Kalbar Terpuruk*. <https://www.pontianakpost.co.id/daya-saing-kalbar-terpuruk>. Diakses pada 8 Februari 2019

pusat dan daerah sangat diperlukan dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam mendukung para investor⁶.

Kini, kondisi perekonomian di Kalbar sudah membaik ditandai dengan berkurangnya jumlah pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan naiknya angka laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya PMA maupun PMDN di Kalimantan Barat dalam setiap tahunnya. Adapun sektor yang diminati oleh PMA dan PMDN dalam beberapa tahun terakhir adalah sektor pertanian, perdagangan dan sektor industri pengolahan. Sedangkan dari segi ekspor dan impor, Kalimantan Barat bisa dibilang cukup baik terutama dalam ekspor yang didominasi oleh hasil industri dan non industri yang terus meningkat setiap tahunnya⁷.

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki lahan yang sangat luas ditambah tekstur dan keadaan tanah yang sangat cocok untuk menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, hal itu lah salah satu faktor yang dapat menarik para investor khususnya yang berminat diperkebunan sawit. Hal ini seharusnya menjadi salah satu kelebihan untuk memajukan daerah Kalbar, baik dalam skala nasional maupun

⁶Nurul Bariyah. (2015). *Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita dan HDI*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.4, No.1, hlm 77-93. Diakses pada 9 Februari 2019

⁷FWYuliasih. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Universitas Tanjungpura. file:///C:/Users/user/Downloads/28720-75676588798-1-PB%20(16).pdf. Diakses pada 8 Februari 2019

internasional untuk mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Pemerintah Kalimantan Barat harus memiliki rencana dan strategi dalam hal pembenahan infrastruktur yang lebih baik, salah satunya masalah kelistrikan yang menjadi salah satu unsur penting dalam hal aktivitas perekonomian⁸.

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan juga industri. Manfaat dari energi listrik sangat besar dan sangat penting, tetapi sumber energi pembangkit listrik sangat terbatas dan tidak bisa diperbarui, Oleh karena itu untuk melestarikan sumber energi ini, perlu diupayakannya langkah-langkah strategis agar dapat memenuhi kebutuhan energi listrik secara optimal dan terjangkau⁹. Keterbatasan sumber energi listrik yang tersedia di Indonesia, menyebabkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan listrik sehinggasesering terjadinya pemutusan sementara dan pembagian energi listrik secara bergantian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero)¹⁰.

⁸Nurul Bariyah. (2015). *Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat: Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita dan HDI*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.4, No.1, hlm 77-93. Diakses pada 9 Februari 2019

⁹Alpen Steel. (2018). *Tenaga Listrik Sebagai Sumbenting*. <http://www.alpensteel.com/article/126-113-energi-lain-lain/2383--tenaga-listrik-sebagai-sumber-energi-yang-penting>. Diakses pada 21 Mei 2018

¹⁰Alpen Steel. (2018). *Tenaga Listrik Sebagai Sumbenting*. <http://www.alpensteel.com/article/126-113-energi-lain-lain/2383--tenaga-listrik-sebagai-sumber-energi-yang-penting>. Diakses pada 21 Mei 2018

Posisi ketahanan energi Indonesia semakin merosot dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya, ketidakseimbangan laju ketersediaan energi dengan kebutuhan berdasarkan data yang dirilis Dewan Energi Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 129 negara pada 2014¹¹. Ketahanan energi meliputi 3 aspek, yaitu ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kemajuan pengembangan energi baru terbarukan. Peringkat ini merosot dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ke-29 dan pada tahun 2011 turun ke peringkat 47. Hal ini juga dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak dalam negeri terus merosot, sedangkan permintaan selalu meningkat. Indonesia juga terlalu bertumpu pada minyak bumi sebagai sumber energi, dan tidak mengembangkan energi lain. Sedangkan untuk energi panas bumi dan tenaga surya beremisi rendah, ongkosnya masih tinggi¹².

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah kelistrikan di Indonesia. Hampir setiap hari pemadaman secara bergantian terjadi di beberapa wilayah seperti Kota Pontianak dan sekitarnya sampai ke daerah Kapuas Hulu. Bahkan, pemadaman listrik untuk wilayah Sintang

¹¹Kementerian Perindustrian. (2014). *Ketahanan Energi Indonesia Merosot*. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/11320/Ketahanan-Energi-Indonesia-Merosot>. Diakses pada 9 Februari 2019

¹²Kompas.com. (2017). *Energi Baru Terbarukan Menjadi Kunci Ketahanan Energi Indonesia*. <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/20/214402626/energi-baru-terbarukan-menjadi-kunci-ketahanan-energi-indonesia>. Diakses pada 8 Februari 2019

bisa dari pagi hingga dini hari yang disebabkan daya listrik yang terbatas. Mesin pembangkit milik PT.PLN wilayah Kalbar juga secara sengaja melakukan tahapan pemadaman tersebut, hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan dari bahan bakar minyak (BBM) yang menipis. Akibatnya, dua pembangkit listrik di Pontianak sudah tidak dapat bekerja secara maksimal¹³.

Dengan macetnya pasokan BBM yang tersedia jenis solar bagi kedua pusat pembangkit yang dimiliki oleh PT.PLN wilayah Kalbar, kondisi kelistrikan di Kota Pontianak dan sekitarnya terancam “black out” atau padam total. Jumlah pemakaian energi listrik tertinggi di wilayah Kalbar adalah Kota Pontianak, dengan daya mampu 110 MW, beban puncak mencapai 115 MW sehingga PLN melakukan pemadaman secara bergantian semenjak tahun 2006. Semua wilayah industri, pemukiman, perdagangan yang dialiri sejumlah feeder atau penyulang mendapat pemadaman secara bergantian dalam jangka waktu tiga hari. Lama pemadaman listrik pada siang hari, dimulai pada jam 06:00 pagi hingga jam 4 sore dan jam 6 hingga 10 di waktu malam. Pemadaman setiap hari ini dapat merugikan usaha-usaha kecil yang sangat membutuhkan daya listrik seperti warnet, percetakan, kue, makanan, minuman, dan usaha lainnya. Pemadaman listrik setiap hari ini juga sangat berpengaruh

¹³Alpen Steel. (2019). *Masalah Kelistrikan di Kalbar*. <http://www.alpensteel.com/article/131-225-pemadaman-listrik/1338-masalah-kelistrikan-di-kalbar>. Diakses pada 26. Diakses pada 26 Mei 2018

terhadap pabrik-pabrik industri besar sehingga mengganggu aktivitas investasi dan ekonomi di Kalimantan Barat¹⁴.

Dalam menangani permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam penambahan pembangkit listrik di Indonesia khususnya Kalimantan Barat salah satunya yaitu dengan melakukan kerjasama interkoneksi tenaga listrik dengan negara tetangga yaitu Sarawak (Malaysia Timur) melalui program ASEAN Power Grid. ASEAN mempercayai kegunaan penting dari infrastruktur listrik yang efisien, handal serta tangguh dalam merangsang perekonomian dan pembangunan regional. Untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat, investasi besar dalam kapasitas pembangkit listrik sangat diperlukan. Dalam mengakui potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari pembentukan sistem terintegrasi ASEAN menetapkan pengaturan interkoneksi listrik kawasan melalui ASEAN Power Grid (APG) dibawah Visi ASEAN 2020 yang diadopsi dalam KTT informal ASEAN ke 2 di Kuala Lumpur pada 2 Desember 1997. *Heads of ASIAN Power Utilities/Autorities* (HAPUA), sebagai *Specialised Energy Body* (SEB) yang ditugaskan untuk memastikan keamanan energi

¹⁴Alpen Steel. (2019). *Masalah Kelistrikan di Kalbar*. <http://www.alpensteel.com/article/131-225-pemadaman-listrik/1338-masalah-kelistrikan-di-kalbar>. Diakses pada 26. Diakses pada 26 Mei 2018

regional dengan mempromosikan pemanfaatan dan pembagian sumber daya yang efisien¹⁵.

Kerjasama di bidang energi ini juga sebagai bentuk kesadaran ASEAN terhadap kondisi ekonomi di Asia Tenggara yang terus mengalami perkembangan, serta adanya keberagaman sumber daya yang dimiliki oleh negara anggota. Sejumlah negara anggota ASEAN menjadi eksportir dan importir energi, namun ada juga negara yang masih kurang dalam pengembangan sumber daya energi. Dengan demikian, kerjasama ini merupakan suatu usaha ASEAN dalam mendorong integrasi energi di Asia Tenggara, sehingga dapat memaksimalkan potensi energi yang tersedia secara efisien¹⁶.

Secara umum, kerjasama APG adalah kerjasama pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menghubungkan antar negara di Asia Tenggara hingga tahap regional. Sistem tenaga listrik ini tersambung melalui saluran transmisi, dan melalui kerjasama ini juga dapat meratakan potensi cadangan energi yang dimiliki antar negara anggota ASEAN. APG mempunyai 16 proyek interkoneksi, dan terdapat 3 total proyek interkoneksi APG antara Indonesia dan Malaysia, yakni: Proyek

¹⁵ASEAN Center For Energy, (2017). ASEAN Power Grid. <http://www.aseanenergy.org/programme-area/apg/>. Diakses pada 9 Februari 2019

¹⁶ASEAN Secretariat. (2014). *Overview*. <http://www.asean.org/asean/about-asran/overview>. Diakses pada 25 Februari 2019

¹⁶ Heny KS. (2017). *Membangun Keamanan Energi ASEAN MELALUI Integrasi Regional (Implementasi ASEAN Power Grid) di Kalbar-Sarawak*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Diakses pada 10 Februari 2019

Sarawak-Kalbar, Sumatera-Semenanjung Malaysia, dan Sabah-Kaltara. Di antara ketiga proyek tersebut, yang telah selesai hingga saat ini merupakan proyek Kalimantan Barat-Sarawak. Interkoneksi Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan karena memiliki wilayah yang saling berbatasan, sehingga jual-beli tenaga listrik dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dari kedua negara¹⁷. Dengan adanya suatu program kerjasama di bidang interkoneksi listrik ASEAN (ASEAN Power Grid), transfer listrik dari Sarawak dapat berjalan secara proporsional sehingga dapat menguntungkan semua pihak, sehingga Indonesia yang membutuhkan pasokan listrik yang besar dapat terealisasi melalui interkoneksi. Keuntungan lainnya juga diharapkan dengan adanya kerjasama ini adalah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi setiap negara anggota dengan pengelolaan energi yang baik untuk memperkuat tenaga listrik di kawasan Asia Tenggara¹⁸.

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik (ASEAN Power Grid) antara Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian di Kalimantan Barat.

¹⁸Heny KS. (2017). *Membangun Keamanan Energi ASEAN MELALUI Integrasi Regional (Implementasi ASEAN Power Grid) di Kalbar-Sarawak*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Diakses pada 10 Februari 2019

C. Kontribusi Penelitian

1. Praktis

- a. Tesis ini sebagai acuan dalam membantu kinerja Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melihat pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik terhadap perekonomian daerah.
- b. Tesis ini dapat menjadi wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta teori yang didapat selama dibangku kuliah yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah/tesis.

2. Akademis

- a. Tesis ini akan menambah pengetahuan terkait kerjasama interkoneksi tenaga listrik.
- b. Tesis ini juga dapat mengembangkan sebuah gagasan tentang paradiplomasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian di Kalimantan Barat?”

E. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan review pustaka pada penelitian yang bersumber dari artikel dan jurnal

mengenai kerjasama interkoneksi tenaga listrik (ASEAN Power Grid):\

1. “Kerjasama ASEAN Power Grid Dalam Meningkatkan Ketahanan Listrik di Indonesia” yang ditulis oleh Andreas Said dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018.

Penulis menjelaskan bahwa kerjasama ASEAN Power Grid (APG) merupakan kerjasama kelistrikan yang menghubungkan setiap anggota ASEAN menjadi satu aliran listrik, memberikan dampak positif bagi Indonesia, tidak hanya meningkatkan ketersediaan serta keandalan listrik suatu kawasan yang terhubung dalam kerjasama tersebut, namun juga memberikan motivasi untuk meningkatkan ketahanan listrik dalam negeri Indonesia. Adapun motivasi yang diberikan adalah dengan menciptakan proyek yang dapat meningkatkan ketahanan listrik, memperbaiki regulasi terkait kelistrikan dan pengadaan infrastruktur listrik. Program 35,000 Mw merupakan salah satu motivasi yang lahir dari adanya kerjasama APG, program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan listrik Indonesia yang dimulai dari tahun 2014 hingga 2019¹⁹.

¹⁹Andrea SAIDs. (2018). *Kerjasama ASEAN Power Grid dalam Meningkatkan Ketahanan Listrik di Indonesia*. JOM Fisip Vol.5. Edisi II Juli-September 2018. Diakses pada 10 Februari 2019

2. “Studi Stabilitas Sistem Interkoneksi Sarawak – Kalimantan Barat” yang ditulis oleh Daniel Prahara Eka Ramadhani dalam Proceeding Seminar Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro FTI-ITS tahun 2015

Dalam penelitian yang ditulis oleh Daniel Prahara Eka Ramadhani menguraikan tentang cara menstabilkan sistem interkoneksi Sarawak-Kalbar saat terjadi gangguan besar seperti lepasnya pembangkit terbesar dari sistem dan gangguan hubung singkat pada jalur interkoneksi menggunakan bantuan software ETAP, sehingga sistem dapat mempertahankan keseimbangannya²⁰. ETAP adalah sebuah perusahaan perangkat lunak rekayasa analitik spektrum penuh yang berspesialisasi dalam analisis, simulasi, pemantauan, kontrol, optimisasi, dan otomatisasi sistem tenaga listrik. *Software* ETAP menawarkan rangkaian solusi perusahaan sistem tenaga terintegrasi terbaik dan terlengkap²¹.

3. “Posisi Indonesia Pada Kerjasama Energi Regional dalam Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Studi Kasus: *Asean Power Grid*” yang ditulis oleh Atika Octavia Harefa dalam Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakry, tahun 2016

²⁰Daniel ER Prahara. (2015). *Studi Stabilitas Sistem Interkoneksi Sarawak-Kalimantan Barat*. Proceeding Seminar Tugas Akhir Teknik Elektro FT-ITS. Diakses pada 10 Februari 2019

²¹ETAP. (2019). *Electrical Power System Analysis & Operation Software*. <https://etap.com/>. Diakses pada 12 Februari 2019

Dalam tulisan ini, penulis melihat kerjasama APG ini melalui pandangan relais yang melihat kerjasama ini dapat dimanfaatkan dalam ‘menyimpan’ energi dalam memenuhi kebutuhan nasional sendiri sehingga dapat menguntungkan dinamika politik yang kini semakin bersaing satu sama lain. Pada ummnya, permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait kerjasama ini adalah biaya, sehingga membutuhkan investor. Dengan demikian, kebutuhan akan ketersediaan listrik di Indonesia dapat terealisasi secara efektif dan siap memasuki era MEA dalam memanfaatkan kerjasama ini²².

4. “Analisa Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar dan Biaya Pokok Produksi Pada Pembangkit Sistem Khatulistiwa Setelah Terkoneksi Dengan Sistem Sarawak” yang ditulis oleh M. Iqra Orytuasikal dalam Jurnal S1 Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura tahun 2018

Penulis menjelaskan bahwa efisiensi pemakaian bahan bakar dan biaya pokok produksi (BPP) terhadap sistem pembangkit Khatulistiwa setelah tersambung dengan sistem sarawak sangatlah penting, karena dapat menguntungkan kedua negara secara teknis, ekonomis, dan lingkungan yang sangat berarti dalam menghasilkan energi listrik. Kerjasama antara Sistem sarawak dan Khatulistiwa merupakan pertama kali sehingga

²²Atika Octavia H. (2016). *Posisi Indonesia Pada Kerjasama Regional dalam Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Studi Kasus: ASEAN Power Grid*. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Jakarta 2-3 Mei 2016. Diakses pada 10 Februari 2019

mengalami pertumbuhan peningkatan konsumsi dalam bahan bakar dan BPP pada sistem Khatulistiwa, sehingga perlu dilakukan analisis menggunakan bantuan Software ProSym dan Metode Koefisien untuk mengetahui beban dan tingkat efisiensi dari interkoneksi ini. Dari hasil simulasi efisiensi bahan bakar dengan tersambungannya kedua sistem sebanyak 287.856 Kilo liter dan penurunan BPP sebanyak Rp. 318/KWh di tahun 2018²³.

5. “Membangun Keamanan Energi ASEAN Melalui Integrasi Listrik Regional (Implementasi ASEAN Power Grid) di Kalbar – Sarawak” yang ditulis oleh Heny Kristama Sinambela dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman tahun 2017

Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan bahwa proyek interkoneksi *ASEAN Power Grid* di Kalimantan Barat – Sarawak dapat dikatakan berhasil karena kedua negara sama-sama merasakan manfaat dengan bertambahnya cadangan energi pada sistem kelistrikan sehingga terjadinya surplus, serta menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Kerjasama interkoneksi ini memberikan tambahan daya secara perlahan sehingga daerah-daerah yang dulunya sering mengalami

²³M Iqra Orytuasikal. (2018). *Analisa efisiensi konsumsi bahan bakar dan biaya pokok produksi pada pembangkit sistem Khatulistiwa setelah terkoneksi dengan sistem Sarawak*. Jurnal S1 Teknik Elektro Universitas Tanjung. Diakses pada 10 Februari 2019

pemadaman listrik menjadi daerah yang tidak lagi mengalami pemadaman. Sedangkan untuk Sarawak, Malaysia, yang menjadi negara pengeksport listrik untuk Kalimantan Barat, tentunya mengalami keuntungan dalam hal menjual tenaga listrik mereka untuk 5 tahun kedepan sejak terjalannya kerjasama atau dalam fase pertama perjanjian. Dalam fase kedua, Kalimantan Barat yang kedepannya akan mengalami kemajuan dalam pengembangan tenaga listriknya, dapat bertransaksi menjual tenaga listrik untuk Sarawak, Malaysia²⁴.

Tabel I. Literature Review

| No | Penulis dan Tahun Terbit | Judul Penelitian | Substansi Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1. | Andreas Said dalam JurnalOnline Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018 | “Kerjasama ASEAN Power Grid dalam meningkatkan ketahanan listrik di Indonesia” | Motivasi-motivasi yang berdampak positif dalam meningkatkan pasokan dan ketahanan energi listrik Indonesia melalui kerjasama ASEAN Power Grid (APG). Salah satunya dengan menciptakan proyek 35,000 M yang merupakan salah satu motivasi yang lahir dari adanya kerjasama |

²⁴Heny KS. (2017). *Membangun Keamanan Energi ASEAN MELALUI Integrasi Regional (Implementasi ASEAN Power Grid) di Kalbar-Sarawak*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Diakses pada 10 Februari 2019

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | APG, |
| 2. | Daniel Prahara Eka Ramadhani dalam Proceeding Seminar Tugas Akhir Jurusan Teknik Elektro FTI-ITS tahun 2015 | “Studi stabilitas sistem interkoneksi Sarawak – Kalimantan Barat” | Kegunaan software ETAP dalam menstabilkan sistem interkoneksi Sarawak-Kalbar saat terjadi gangguan besar seperti lepasnya pembangkit terbesar dari sistem dan gangguan hubung singkat pada jalur interkoneksi sehingga sistem dapat mempertahankan keseimbangannya |
| 3. | Atika Octavia Harefa dalam Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakry, tahun 2016 | “Posisi Indonesia pada kerjasama energi regional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, studi kasus: <i>Asean Power</i> ” | Melihat kerjasama APG ini melalui pandangan relais, kerjasama ini dapat dimanfaatkan dalam ‘menyimpan’ energi dalam memenuhi kebutuhan nasional sendiri sehingga dapat menguntungkan dinamika politik yang kini semakin bersaing satu sama lain. Pada ummnya, permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait kerjasama ini adalah biaya, sehingga membutuhkan investor. Dengan demikian, kebutuhan akan ketersediaan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | listrik di Indonesia dapat terealisasi secara efektif dan siap memasuki era MEA |
| 4. | M. Iqra Orytuasikal dalam Jurnal S1 Teknik Elektro Universitas Tanjungpura tahun 2018 | “Analisa efisiensi konsumsi bahan bakar dan biaya pokok produksi pada pembangkit sistem Khatulistiwa setelah terkoneksi dengan sistem Sarawak” | Menganalisa Efisiensi bahan bakar dan BPP dari kerjasama interkoneksi antara sistem Khatulistiwa dan Sarawak dalam menggunakan Software ProSym dan Metode Koefisien di tahun 2018 |
| 5. | Heny Kristama Sinambela dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman tahun 2017 | “Membangun keamanan energi ASEAN melalui integrasi listrik regional (implementasi ASEAN Power Grid) di Kalbar – Sarawak” | Manfaat proyek kerjasama interkoneksi ASEAN <i>Power Griddi</i> Kalimantan Barat – Sarawak dapat dirasakan bagi kedua negara dengan bertambahnya cadangan energi pada sistem kelistrikan sehingga tidak terjadi defisit, serta menurunkan BPP tenaga listrik. Malaysia, yang menjadi negara pengekspor listrik untuk Kalimantan Barat, tentunya mengalami |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | keuntungan dalam hal menjual tenaga listrik untuk 5 tahun pertama setelah terjalannya kerjasama |
|--|--|--|---|

Dari *Literature review* diatas, menunjukkan bahwa para peneliti dan akademisi telah melakukan penelitian yang beragam tentang kerjasama interkoneksi tenaga listrik (ASEAN Power Grid). Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas tentang proyek kerjasama interkoneksi tenaga listrik (ASEAN Power Grid) antara Kalimantan Barat dan Sarawak, sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian serta perspektif penelitian. Pada penelitian terdahulu, penulis menemukan jurnal yang menganalisa “Efisiensi konsumsi bahan bakar dan biaya pokok produksi pada pembangkit sistem Khatulistiwa setelah terkoneksi dengan sistem Sarawak”. Penulis juga menemukan jurnal yang membahas ‘Posisi Indonesia pada kerjasama energi regional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam studi kasus *Asean Power Grid*’. Selain itu, terdapat jurnal yang berfokus pada studi stabilitas sistem interkoneksi Sarawak – Kalimantan Barat. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengaruh kerjasama intrkoneksi tenaga listrik antara Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian di Kalimantan Barat. Belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian di Kalimantan Barat. Penulis

menggunakan perspektif paradiplomasi dan teori pertumbuhan ekonomi tentang bagaimana proyek strategis nasional Indonesia dijalankan oleh aktor lokal dalam mengembangkan potensi perekonomian daerah, sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya,

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab dan menjelaskan pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian di Kalimantan Barat, maka penulis akan menggunakan konsep dan teori yang sesuai dengan pembahasan diatas.

Adapun konsep dan teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Konsep Paradiplomasi

Paradiplomasi secara tradisional didefinisikan sebagai kerjasama luar negeri antar negara dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, terutama dalam hal penyelesaian konflik dan perdamaian. Dalam hal berdiplomasi, proses nya harus dilakukan dengan kerangka yang terperinci, dimulai dari pembukaan manajemen konflik, informasi dan komunikasi, negosiasi internasional, kewajiban perlindungan,, dan partisipasi dalam tata tertib internasional. Semua proses ini dilakukan dalam kerangka formal kenegaraan, namun dari tahun ke tahun diplomasi terus berkembang sehingga diplomasi mengalami

peergeseran arti²⁵. Pergeseran ini kemudian membuat arti diplomasi itu sendiri dari yang bersifat formal dan kenegaraan menuju arti yang lebih luas. Diplomasi kini tidak lagi mengarah kepada kerjasama internasional antara negara melalui perwakilan diplomat resmi, tetapi kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor sub-negara sesuai kepentingan Diplomasi modern menempatkan para pelaku diplomasi bukan negara ini pada posisi penting dalam hubungan internasional, mereka juga diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan internasional dan sering menjadi rekan negara dalam berdiplomasi²⁶.

Perkembangan pengertian diplomasi ini tentu memberikan dampak yang luas. Teori-teori mengenai diplomasi modern juga mengalami perkembangan sehingga adanya *multi-track diplomasi*, total diplomasi, dan paradiplomasi. Perkembangan ini tentunya mengadaptasi dari perubahan global yang terus berintegrasi dalam berbagai hal yang kompleks. Dimana peran pemerintah pusat tidak lagi menjadi aktor utama dalam bekerjasama dengan negara lain, tetapi pemerintah daerah juga memiliki andil dalam melakukan kerjasama dengan daerah lain di berbagai negara²⁷

²⁵Kemlu Republik Indonesia. (2016). *Indonesia Tegaskan Pentingnya Mengatasi Akar Penyebab Konflik Melalui Mediasi*. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-tegaskan-pentingnya-mengatasi-akar-penyebab-konflik-melalui-mediasi-.aspx>. Diakses pada 11 Februari 2019

²⁶YO Supratnan. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diplomasi*. <https://repository.unpas.ac.id/12090/3/BAB%201.docx>. Diakses pada 11 Februari 2018

²⁷Porsi Ilmu.com. (2015). *Perkembangan Para Paradiplomasi dalam Hubungan Internasional*. <https://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html>. Diakses pada 12 Februari 2019

Paradiplomasi adalah sebuah kajian yang relatif baru dalam ilmu hubungan internasional, mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh aktor '*sub-state*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah Paradiplomasi pertama kali dikenalkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central*', menurut Aldecoa, Keating dan Bayer. Istilah lain yang pernah dikemukakan oleh Ivo Duchacek (New York, 1990) untuk konsep ini adalah '*micro – diplomacy*'²⁸.

Konsep *paradiplomacy* ini juga membahas bagaimana politik domestik memiliki *linkage* terhadap politik internasional, sebagai salah satu aktor dari globalisasi. Dalam jurnalnya yang berjudul *Paradiplomacy*, Stefan Wolff mencoba untuk menengahi argumen antara kaum realis dan transformis. Wolff menyatakan bahwa Paradiplomasi mengindikasikan bahwa negara tetap menerapkan pemilik kedaulatan dalam bentuk penuh. Namun demikian, konsep kedaulatan ini tak lagi hanya dipandang eksklusif dengan melihat doktrin Westphalia secara bulat-bulat. Paradiplomasi, dalam gagasan Wolff dipandang sebagai sebuah mekanisme bagi negara untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam memanfaatkan *power*. Wolff menganggap

Porsi Ilmu.com. (2015). Perkembangan Para Paradiplomasi dalam Hubungan Internasional. <https://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html>. Diakses pada 12 Februari 2019

bahwa kemunculan aktor-aktor internasional bukanlah ancaman negara namun merupakan sebuah tren dimana negara harus mulai membagi *power*-nya dengan aktor lokal. Sehingga negara mampu memperoleh keuntungan yang lebih maksimal, tentu saja bila dibandingkan dengan diplomasi konvensional yang *State-Centric*²⁹. Posisi Wolff yang moderat ini tertulis dalam sub-bagian jurnalnya tentang ‘Opportunity and Interest Structures’.

*“Having the legal ability to participate in the international arena and actually doing so are, of course, two different things. The degree to which autonomous entities are participating in the international arena depends essentially on how their opportunity and interest structures are shaped”*³⁰.

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi dari setiap negara tidak dapat disamakan. Hal ini sangat tergantung kepada bagaimana negara yang bersangkutan dalam melakukan pembagian kedaulatan kepada aktor lokal dibawahnya. Konsep paradiplomasi juga berhubungan dengan konsep *multitrack diplomacy*. Paradiplomasi menganggap bahwa tidak hanya sebagai aktor central di dalam suatu hubungan internasional. Unsur *multitrack diplomacy* juga bisa kita pinjam dalam melihat aktor manakah yang melakukan sebuah hubungan kerjasama.

²⁹Stefan Wolf. (2007). *Paradiplomacy*. The Bologna Center Journal of International Affairs Vol. 10. Hlm 7

³⁰*Ibid*

Fenomena paradiplomasi memang pada awalnya muncul di Eropa, namun saat ini dengan intensitas yang berbeda, telah menjadi gejala umum ditengah interaksi transnasional masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banyak daerah otonom atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang secara aktif menjalin kerjasama luar negeri dengan pihak asing dengan bentuk ikatan '*memorandum of understanding*' atau bentuk-bentuk perjanjian internasional lainnya. Menurut Mochtar Masoed, daerah otonom pada konteks paradiplomasi ada pada perpotongan antara urusan dalam negeri dengan urusan luar negeri. Keterkaitan daerah otonom dalam hubungan internasional adalah perannya selaku akto³¹r.

Oleh karena itu, arti penting daerah otonom dalam studi hubungan internasional tidak dapat dikesampingkan, mengingat daerah otonom dapat secara langsung melakukan hubungan internasional dengan pihak asing, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan kata lain, daerah otonom dapat melakukan *by pass* tanpa harus melalui pemerintah pusat (dengan ketentuan dari negara pemberi *power* yang bersangkutan). Tidak hanya entitas sub-nasional, aktor-aktor ini dapat berwujud kelompok masyarakat, suku-suku, kelompok kepentingan ekonomi, maupun perusahaan multinasional³².

³¹Takdir Ali Mukti. (2013). *Paradiplomasi: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Indonesia*. The Phinisi Press, Yogyakarta, hlm 40

³²Ibid

Paradiplomasi diyakini dapat berhasil dalam memahami masyarakatnya sehingga kerjasama luar negeri yang dijalin dapat berfokus pada perkembangan daerah di beberapa sektor: Paradiplomasi terbagi menjadi 3 tipe, yaitu³³:

1. *Transborder paradiplomacy*

Proses diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor sub-negara yang berbatasan langsung secara geografis

2. *Transregional paradiplomacy*

Proses diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub-negara yang berbeda negara, tetapi satu kawasan

3. *Global paradiplomacy*

Proses diplomasi yang dilakukan oleh aktor sub-negara di kawasan berbeda

Selain ketiga tipe paradiplomasi tersebut, Di dalam jurnal *political issues of paradiplomacy* yang ditulis oleh Andre Lecours, juga mengemukakan terkait konsep yang bernama *three layers of paradiplomacy*. Konsep tersebut berisi tentang tiga kepentingan paradiplomasi dalam membedakan paradiplomasi satu dengan yang lain. Pertama-tama, Lecours mengatakan bahwa lapisan paradiplomasi pertama adalah kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah sub-negara bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dengan tujuan menarik investasi asing, mengundang perusahaan internasional, dan menarget pasar untuk

³³Porsi Ilmu.com.(2015). *Perkembangan Para Paradiplomasi dalam Hubungan Internasional*.
<https://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html>. Diakses pada 12 Februari 2019

ekspor. Lapisan ini tidak memiliki dimensi politik yang eksplisit, serta tak memiliki isu-isu yang menyinggung kebudayaan, lapisan pertama ini bersifat pragmatis atau semata-mata hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Kemudian, perjanjian kerjasama pada lapisan ini tidak mempunyai karakteristik yang mengatur *exchange of knowledge* atau aktivitas *capacity building* didalam nota kesepahamannya³⁴.

Pada lapisan kedua mencakup kerjasama yang luas, yakni *cooperation*, yang berarti unsur *exchange knowledge* antar pihak sehingga paradiplomasi menjadi luas dan multi dimensi karena lapisan ini tidak hanya berfokus pada hal pragmatis seperti keunggulan ekonomi. Pada lapisan ketiga, paradiplomasi lebih memandang politik. Paradiplomasi lebih menampilkan identitas politik yang berbeda dari pemerintah pusat yang memberikan *share of power*. Paradiplomasi di lapisan ini bertujuan untuk melihatkan identitas politik dan tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan ekonomi ataupun *exchange knowledge*. Pada lapisan ini jugam para aktor sub-negara ingin memperlihatkan otonomi mereka yang berbeda dari wilayah/pemerintah pusat³⁵. Dari ketiga lapisan tersebut, disimpulkan bahwa paradiplomasi adalah hal yang memiliki banyak kegunaan. Aktor Daerah dapat memilih pada lapisan mana saja yang akan mereka jalani. Dalam

³⁴Andre Lecours. (2008). *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons From The Developed World*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. hlm 1

³⁵Andre Lecours. (2008). *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons From The Developed World*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. hlm 1

perkembangan masyarakat sekarang ini, paradiplomasi dapat dilihat sebagai pendekatan yang mendalam dengan banyak tujuan didalamnya³⁶.

Dari pemaparan AndreLecour mengenai tiga lapisan paradiplomasi diaas, maka penelitian ini akan menggunakan konsep paradiplomasi pada lapisan pertama, yaitu kepentingan ekonomi, dimana lapisan ini pemerintah sub-negara bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dengan tujuan menarik investasi asing, mengundang perusahaan internasional, dan menarget pasar untuk ekspor.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional yang dilakukan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah³⁷. Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan

³⁶*Ibid*

³⁷Rahardjo Adisasmata. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 4

menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu³⁸. Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
- 2) Menyelenggarakan peradilan
- 3) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum.

Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraan anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi besaran, pertumbuhan, dan struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara³⁹.

Menurut Khuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan masa dimana kapasitas suatu negara dalam jangka panjang mengalami kenaikan dalam menyuplai kebutuhan barang ekonomi penduduknya. Peningkatan kapasitas itu terjadi karena terjadinya kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologi terhadap kondisi permintaan yang ada⁴⁰. Secara umum, teori pertumbuhan

³⁸*Ibid*

³⁹Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, No.1, hlm 44-55

⁴⁰Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, No.1, hlm 44-55

ekonomi diklasifikasikan menjadi dua, pertama teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, dan W.A Lewis. Analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Pada teori ekonomi klasik, analisis berdasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Sedangkan pada teori pertumbuhan ekonomi modern mempunyai ciri-ciri dasar yang mengakui akan pentingnya peran pemerintah terhadap perekonomian dalam mengatasi kegagalan sistem pasar bebas. Teori ini mengakui campur tangan pemerintah akan membuat sistem pasar bebas lebih efektif⁴¹.

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern adalah teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Domar mengemukakan bahwa teori ini merupakan teori pengembangan Teori Keynes jangka pendek menjadi teori makro jangka panjang yang berasumsi pengeluaran investasi tidak memiliki pengaruh dalam permintaan agregat, namun terhadap penawaran agregat melalui pengaruh terhadap kapasitas produksi. Dalam pandangan yang lebih luas, investasi akan meningkatkan stok kapital sehingga dapat mendorong kemampuan masyarakat dalam

⁴¹Quipper.com. (2019). *Yuk Belajar Tentang Pertumbuhan Ekonomi*. <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/pertumbuhan-ekonomi/>. Diakses pada 16 April 2019

menghasilkan *output*. *Oitput* tersebut merupakan potensial yang dapat dihasilkan dari stok kapital yang ada⁴².

Secara umum, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, sumber daya alam, jumlah dan mutu pendidikan penduduk, Ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial, dan juga pasar. Keterbukaan ekonomi suatu negara akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan. Perekonomian suatu negara yang terintegrasi dengan perekonomian global memiliki kesempatan yang lebih untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing sehingga efisiensi tercapai. Indonesia merupakan perekonomian terbuka selama orde baru perekonomian Indonesia terintegrasi dengan dunia, sehingga pengaruh kegiatan ekspor maupun impor merupakan salah satu pendorong pertumbuhan. Kegiatan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di perbatasan yang terintegrasi dengan negara lain juga dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah kekuasaan yang lebih sedikit akan memudahkan kebijakan maupun keputusan yang tepat dan efektif dalam meningkatkan PDRB perkapita masyarakatnya⁴³.

⁴²Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, No.1, hlm 44-55

⁴³Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, No.1, hlm 44-55

Dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat juga memanfaatkan efisiensi dari kerjasama intrakoneksi tenaga listrik yang dilakukan dengan negara Sarawak, Malaysia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai indikator keberhasilan kerjasama internasional tersebut.

G. Hipotesa

Hipotesa sementara yang dikemukakan penulis pada tesis ini adalah :

1. Adanya pengaruh positif terhadap perekonomian di Kalimantan Barat dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 5,20%
2. Adanya surplus daya pada sistem tenaga listrik Kalimantan Barat sebesar 110,61 Mw setelah satu (1) tahun terkoneksi dengan sistem Sarawak sejak Januari 2016

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data berdasarkan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁴ Cara ilmiah yang dimaksud adalah penelitian dilakukan secara sistematis, rasional dan empiris. Selain itu, metode penelitian adalah cara sistematis dan obyektif untuk mendapatkan informasi yang lebih teliti dan efisien.⁴⁵ Artinya penelitian

⁴⁴Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta. Hlm 3

⁴⁵Hadiboroto dalam Simanjutak, A.B. & Sosrodiharjo, S.(2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 3.

sistematis adalah penelitian dilakukan mengikuti sistem yang berlaku dalam kegiatan penelitian. Sedangkan, obyektif adalah sikap pasti yang diyakini keabsahannya dengan melibatkan pendapat berdasarkan fakta dan data. Adapaun pendapat lain yang selaras, metode penelitian adalah sebuah pendekatan yang sistematis yang diperlukan untuk keseluruhan kegiatan penelitian dan studi tentang metode penelitian yang dapat digunakan sehingga menghasilkan pengetahuan baru.⁴⁶ Dengan kata lain, metode penelitian diperlukan dalam serangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pembaruan informasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa cara :

1) Jenis Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengaruh kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian Kalimantan Barat.

2) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis selama penelitian ini adalah :

⁴⁶K.H Timotius. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: ANDI.

- a. Data sekunder terdiri dari buku, dokumen, jurnal, surat kabar, dan situs internet ataupun laporan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- b. Data primer terdiri dari beberapa dokumen, arsip, undang-undang, dan observasi (penelitian lapangan).

3) **Teknik Analisis data**

Teknik analisis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif serta memanfaatkan landasan teori serta konsep dalam mengarahkan agar fokus penelitian sesuai dengan data di lapangan, Sebagai pelengkap, penulis akan menyertakan dengan data-data yang terdiri dari angka-angka statistik sebagai penunjang apabila mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitia ntesis ini terdiri dari:

Bab I : Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II : Menggambarkan secara umum tentang *ASEAN Power Frid*

- Bab III : Menjelaskan mengenai kegiatan atau aktivitas kerjasama interkoneksi antara Kalimantan Barat dan Sarawak.
- Bab IV : Menganalisis pengaruh dari kerjasama interkoneksi tenaga listrik antara Kalimantan Barat dan Sarawak terhadap perekonomian di Kalimantan Barat
- Bab V : Kesimpulan. Bab ini berisi tentang penjelasan ringkas dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.